



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2024/PA Ek

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah Kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Penggugat@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, dahulu di Kabupaten Enrekang namun sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia,, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA Ek, tertanggal 23 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di BTN Hartaco Indah Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hamzah dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh Daheri dan Syukur sedangkan yang menikahkan adalah Imam kampung yang bernama Martani;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah, Tergugat berstatus telah menikah dengan wanita lain dan Penggugat berstatus perawan;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat, tidak pernah tinggal bersama layaknya suami isteri pada umumnya karena pada saat pernikahan tersebut, Penggugat mengetahui Tergugat masih dalam ikatan pernikahan dengan wanita lain namun saat itu Penggugat sedang hamil anak Tergugat dan sehingga Penggugat dan keluarga Penggugat sepakat hanya mengadakan akad nikah tanpa harus mempertemukan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Makassar, 16 Desember 2021 (umur 2 tahun) belum sekolah dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
7. Bahwa setelah akad nikah Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sehingga sejak saat Tergugat sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA);
9. Bahwa saat ini Penggugat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut;

Primer:

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara **Tergugat** dengan **Penggugat** yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2021 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam di BTN Hartaco Indah Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Fitspot 97,8 FM Enrekang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas permohonan itsbat nikah kumulasi cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Nomor xxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 20 Juli 2023, bermaterai cukup dan telah Nachtzegelend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 November 2021 di BTN Hartaco Indah Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Martani;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Penggugat dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Daheri dan Syukur dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
 - Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat berstatus telah menikah;
 - Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftar pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
 - Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah akad nikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;

2. Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan istri;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 04 November 2021 di BTN Hartaco Indah Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat yang bernama Martani;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hamzah P dan yang menjadi saksi nikahnya adalah Daheri dan Syukur dengan mahar berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah gadis dan Tergugat berstatus telah menikah;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftar pada Pegawai Pencatat Nikah setempat;
- Bahwa Penggugat membutuhkan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah akad nikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya :

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat keterangan ghoib, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan syariat Islam, namun pernikahan tersebut tidak dicatat di Kantor Urusan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, oleh karena itu Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu memohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan sah, sehingga Penggugat mempunyai alas hukum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 04 November 2021 di BTN Hartaco Indah Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Hamzah P, kemudian yang menikahkan adalah Imam Kampung yang bernama Martani, Maharnya berupa cincin emas 2 (dua) gram dan yang menjadi saksi adalah Daheri dan Syukur ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat dan Tergugat semua beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Nikah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di register KUA;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana tersebut di atas, dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup dalam ketentuan pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta asli surat bukti tersebut telah *dinazzegeleen* dan diberi materai, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula alat bukti P berkaitan langsung dengan gugatan Penggugat, serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebab Tergugat ketahuan telah memiliki istri pada saat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan dengan Tergugat tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat salah seorang pergi meninggalkan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Enrekang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2021 di BTN Hartaco Indah Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Abd Jamil Salam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muslimin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H.I.

Abd Jamil Salam, S.H.I.

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslimin, S.Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Penggugat	: Rp 10.000,00
5. PNBP Tergugat	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 370.000,00
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)